



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1473-1484

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Perpajakan Pada UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) Pada UMKM Bakso Bahari

Muhammad Ichwan¹, Hari Purnomo², Wahjuny Djamaa³

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School Depok

Email: ichwanbrothers99@gmail.com[✉]

Abstrak

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) diharapkan menjadi solusi atas masalah yang kerap melanda Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Masalah yang dihadapi UMKM adalah ketidakterdediaan pembukuan yang terstruktur dan sistematis dalam laporan keuangan yang baik sesuai standar EMKM. UMKM seharusnya mampu pihak internal maupun eksternal. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui implementasi penyusunan laporan keuangan dan perpajakan umkm berdsarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK-EMKM) pada usaha dagang milik Bakso Bahari, serta untuk mengetahui apakah usaha Bakso Bahari sudah menerapkan SAK-EMKM dan penerapan sistem perpajakan berdasarkan peraturan pada usaha nya tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di lokasi Gunung Putri, Bogor. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat di lapangan untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Usaha Bakso Bahari di desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum sepenuhnya menerapkan SAK-EMKM dalam penyajian laporan keuangannya..

Kata Kunci: *Laporan keuangan, Laporan Pajak, Akuntansi*

Abstract

Financial Accounting Standards – Micro, Small and Medium Enterprises (SAK-EMKM) are expected to be a solution to the problems that often hit Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The problem faced by MSMEs is the unavailability of structured and systematic bookkeeping in good financial reports according to MSME standards. MSMEs should be able to internally and externally. The purpose of this study is to determine the implementation of the preparation of financial reports and taxation of MSMEs based on the financial accounting standards of micro, small and medium entities (SAK-EMKM) in Bakso Bahari's trading business, and to determine whether Bakso Bahari has implemented SAK-EMKM and the implementation of a taxation system based on regulations in its business. The technique used to collect data through interviews and observations conducted at the Gunung Putri location, Bogor. The data analysis technique uses descriptive analysis techniques, namely by describing the results of interviews conducted in the field to draw conclusions. The results of the study indicate that Bakso Bahari Business in Bojong Nangka Village, Gunung Putri District, Bogor Regency has not fully implemented SAK-EMKM in presenting its financial reports.

Keyword: *Financial Reports, Tax Reports, Accounting*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak UMKM lebih berfokus pada kegiatan operasionalnya sehingga pencatatan dan pelaporan akuntansi dan keuangannya kerap terabaikan. Tanpa ketersediaan catatan dan laporan akuntansi dan keuangan yang baik maka proses evaluasi kinerja UMKM tidak dapat secara mudah dilakukan. Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan saat ini lebih tinggi daripada pendapatan sebelumnya. Padahal indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan yang dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain:

1. UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan,
2. UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik,

3. UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya,
4. UMKM dapat membuat anggaran yang tepat,
5. UMKM dapat menghitung pajak, dan
6. UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu.

Melihat manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi perusahaan mereka. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Alasan pelaku UMKM tidak menggunakan akuntansi antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang rumit, banyak aturan, sulit dan tidak terlalu krusial atau penting. Sebagian pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa penerapan akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba.

Tidak hanya pencatatan pelaporan keuangan akuntansi, peraturan perpajakan pun kerap terabaikan ini dikarenakan para pelaku usaha masih belum faham bagaimana cara penerapan pelaporan pajak pada usaha mereka, sehingga tak banyak para pelaku usaha yang tidak melaporkan pajaknya. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan UMKM untuk mengetahui perjalanan bisnisnya. Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Rasio dapat di hitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio laba rugi yang disusun dari data dan berasal dari perhitungan laba rugi dan rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba rugi. Mengingat hal ini baru, maka belum bisa dipastikan apakah UMKM sudah menerapkan sistem ini atau belum.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia bahwa laporan keuangan entitas terdiri dari : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan para UMKM tidak menerapkan pencatatan akuntansi yang memadai adalah karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi. Bakso Bahari adalah salah satu UMKM di Kota Bogor yang terletak di Jl. Bojong Nangka No. 3, Kec. Gunung Putri Kab.

Bogor. Bakso Bahari mulai melakukan pencatatan keuangan yang kompleks dari mulai mencatat pendapatan uang masuk dan uang keluar cash, transferan dan melalui Go-Food. Laporan tersebut dilakukan dikarenakan laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan, kinerja perusahaan nya apakah mengalami laba atau rugi, serta memantau aktivitas aktiva serta passiva dari usaha Bakso Bahari tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2015:2) metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi usaha yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah ini mencakupi kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Rasional yang berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti metode yang digunakan untuk diamati oleh indera manusia, Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Bakso Bahari di Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Bakso Bahari telah beroperasi sejak 2018 dan memberikan sejumlah besar kontribusi berdasarkan dari temuan penelitian. Berdasarkan wawancara, pemilik Bakso Bahari mengatakan bahwa catatan keuangan mereka sangat tidak kompleks, hanya mencakupi catatan pendapatan dan pengeluaran biaya secara tunai maupun transfer. Hal ini tidak memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). Pemilik Bakso Bahari tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai SAK-EMKM dan bagaimana menyiapkan laporan keuangan dengan benar, hal itulah yang menyebabkan pemilik Bakso Bahari tidak melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM. Pemilik Bakso Bahari tersebut pun tidak lupa untuk melakukan pelaporan pajaknya, pelaporan pajak yang digunakan oleh Pemilik Bakso Bahari adalah dengan melaporkan Pajak Penghasilan Final UMKM (PPh Final UMKM). PPh Final UMKM adalah pajak penghasilan final yang dikenakan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan omzet tertentu. Tarif PPh Final UMKM adalah 0,5% dari omzet, dan berlaku untuk wajib pajak

dengan peredarab bruto di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun. PPh Final UMKM ini biasanya dilaporkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omzwt 4,8 Miliar per tahun dengan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Tarif PPh Final UMKM adalah 0,5% dari omzet, jangka waktu pengenaan PPh Final sendiri terbagi menjadi beberapa yaitu :

- 7 Tahun untuk wajib Pajak orang pribadi
- 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV, Firma, BUMDes, atau perseroan perorangan
- 3 Tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT

Dikarenakan jenis dari usaha Bakso Bahari ini adalah jenis perorangan yang memiliki usaha di bidang kuliner serta usaha Bakso Bahari sudah berdiri lebih dari 7 Tahun, sehingga pelaporan pajaknya dilakukan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian , berikut adalah contoh dari pemasukan dan pengeluaran yang terjadi sehari-hari di Bakso Bahari serta pelaporan pajak PPh Final UMKM. Dan transaksi sampai di Bulan Maret tahun 2025 tercantum pada lampiran.

Tabel 1.1 LAPORAN LABA RUGI BAKSO BAHARI PERIODE 31 MARET 2025

Pendapatan Usaha				
Penjualan Bakso			Rp 30.501.500	
Total Penjualan			Rp 30.501.500	
Harga Pokok Penjualan				
Pembelian Bahan baku Bakso			Rp 15.025.200	
Persediaan Barang Dagang Awal		Rp. 564.500		
Pembelian Bahan Dagang		Rp 9.000.000		
Persediaan Barang Dagang Akhir		Rp. 120.250		
Barang Terjual			<u>Rp 9.444.250</u>	+
HPP			<u>Rp 24.469.450</u>	-
Laba Kotor			Rp 6.032.050	

Beban Usaha			Rp 1.002.000	
Beban Listrik			Rp 205.200	
Beban Air			Rp 200.000	
Beban Lai-lain			Rp 360.000	
Beban Gaji			Rp -	
Beba Sewa			Rp 500.000	
Total Beban Sewa Usaha			Rp 2.267.200	+
Laba Bersih			Rp 3.764.850	

Berdasarkan laporan laba rugi Bakso Bahari periode 31 Maret 2025, terlihat bahwa implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada usaha ini masih belum optimal. Bakso Bahari, yang telah beroperasi sejak 2018 di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, masih menerapkan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, yang hanya mencakup catatan pendapatan dan pengeluaran baik secara tunai maupun transfer.

Laporan laba rugi Bakso Bahari menunjukkan pendapatan usaha dari penjualan bakso sebesar Rp 30.501.500 untuk periode 31 Maret 2025. Struktur laporan laba rugi yang disusun sudah mencakup komponen-komponen utama seperti pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, dan laba bersih. Namun, terdapat beberapa inkonsistensi dalam perhitungan dan kategorisasi yang tidak sesuai dengan standar SAK-EMKM. Harga pokok penjualan yang tercatat sebesar Rp 24.469.450 terdiri dari pembelian bahan baku bakso (Rp 15.025.200) dan barang terjual (Rp 9.444.250) yang dihitung dari selisih persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Proporsi HPP yang mencapai 80,2% dari pendapatan menunjukkan biaya produksi yang relatif tinggi, sehingga hanya menyisakan margin laba kotor sebesar 19,8%.

Pengelolaan beban operasional pada Bakso Bahari masih belum terstruktur dengan baik. Terdapat ketidaksesuaian antara rincian komponen beban operasional (beban listrik, air, lain-lain, dan sewa) yang berjumlah Rp 1.265.200 dengan total beban usaha yang tercatat sebesar Rp 2.267.200. Hal ini mengindikasikan adanya komponen biaya yang tidak terdokumentasi dengan baik atau kesalahan perhitungan yang bertentangan dengan prinsip

pencatatan yang akurat sesuai SAK-EMKM. Selain itu, absennya pencatatan beban gaji karyawan (tercatat Rp 0) menimbulkan pertanyaan tentang kelengkapan pencatatan beban operasional.

Dalam aspek perpajakan, Bakso Bahari telah mengimplementasikan kewajiban perpajakan dengan melaporkan Pajak Penghasilan Final UMKM (PPH Final UMKM) sebesar 0,5% dari omzet, yaitu Rp 152.508 untuk periode Maret 2025. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun, perhitungan pajak ini belum terintegrasi dalam laporan laba rugi dan hanya tercatat dalam laporan posisi keuangan/neraca.

Berdasarkan hasil wawancara yang disebutkan dalam penelitian, pemilik Bakso Bahari mengakui tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai SAK-EMKM dan cara menyiapkan laporan keuangan dengan benar. Hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pencatatan keuangan masih jauh dari standar yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan realitas yang umum terjadi pada banyak UMKM di Indonesia, di mana keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi menjadi kendala utama dalam implementasi standar akuntansi keuangan.

Meski belum sepenuhnya mengadopsi SAK-EMKM, Bakso Bahari telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran secara rutin. Laba bersih sebesar Rp 3.764.850 dengan margin 12,3% menunjukkan operasional yang cukup baik untuk usaha kuliner skala UMKM. Namun, untuk pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan, diperlukan peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar SAK-EMKM.

Untuk memperbaiki implementasi SAK-EMKM pada Bakso Bahari, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang standar akuntansi melalui pelatihan atau pendampingan dari profesional akuntansi. Perbaikan pencatatan keuangan harus mencakup pemisahan yang lebih jelas antara biaya tetap dan variabel, pencatatan beban gaji karyawan, klarifikasi komponen beban lain-lain, perbaikan konsistensi perhitungan, dan integrasi perhitungan pajak ke dalam laporan laba rugi. Dengan perbaikan-perbaikan ini, Bakso Bahari akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari akuntansi keuangan, seperti kemampuan untuk mengetahui kinerja keuangan, memisahkan harta perusahaan dan pemilik, mengetahui posisi dana, membuat anggaran yang tepat, menghitung pajak dengan akurat, dan memantau aliran kas dengan lebih efektif.

Tabel 1.2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BAKSO BAHARI
PERIODE MARET 2025

AKTIVA	Jumlah (Rp)	PASIVA	Jumlah (Rp)
AKTIVA LANCAR		UTANG LANCAR	
Kas dan Setara Kas	8.500.000	Utang Usaha	3.500.000
Persediaan Barang Dagang	120.250	PPh Final UMKM (0,5% × Rp30.501.500)	152.508
Sewa Ruko Dibayar Dimuka	500.000	Total Utang Lancar	3.652.508
Total Aktiva Lancar	9.120.250	UTANG JANGKA PANJANG	
Total Utang Jangka Panjang	-		
AKTIVA TETAP		Total Pasiva (Total Utang)	3.652.508
Peralatan	15.000.000	EKUITAS	
Total Aktiva Tetap	15.000.000	Modal Pemilik (per 1 Maret 2025)	16.702.892
Laba Bersih Periode Berjalan	3.764.850		
TOTAL AKTIVA	24.120.250	Total Ekuitas	20.467.742
TOTAL PASIVA + EKUITAS	24.120.250		

Berdasarkan laporan posisi keuangan (neraca) per 31 Maret 2025 pada UMKM Bakso Bahari menunjukkan upaya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Neraca yang disajikan memperlihatkan struktur aset, kewajiban, dan ekuitas usaha yang mencerminkan kondisi finansial Bakso Bahari pada periode tersebut.

Pada sisi aktiva, Bakso Bahari mencatat total aset sebesar Rp 24.120.250 yang terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar sebesar Rp 9.120.250 terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp 8.500.000 yang mendominasi 93,2% dari total aktiva lancar, menunjukkan posisi likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Persediaan barang dagang tercatat sangat rendah yaitu hanya Rp 120.250

atau 1,3% dari aktiva lancar, yang mengindikasikan pengelolaan persediaan yang efisien atau kemungkinan perputaran persediaan yang sangat cepat, khas untuk usaha kuliner seperti Bakso Bahari. Komponen aktiva lancar lainnya adalah sewa ruko dibayar dimuka sebesar Rp 500.000 yang mencerminkan penerapan konsep akrual dalam pencatatan, meskipun masih sederhana.

Aktiva tetap Bakso Bahari tercatat sebesar Rp 15.000.000 seluruhnya dalam bentuk peralatan, menunjukkan investasi yang cukup signifikan untuk skala usaha mikro. Komponen aktiva tetap ini menyumbang 62,2% dari total aktiva, mengindikasikan bahwa usaha Bakso Bahari mengandalkan aset produktif berupa peralatan untuk menjalankan operasionalnya. Namun, dalam neraca tidak terlihat adanya akumulasi penyusutan, yang seharusnya dicatat untuk menggambarkan penurunan nilai ekonomis peralatan seiring waktu sesuai dengan prinsip SAK-EMKM.

Pada sisi pasiva, kewajiban Bakso Bahari tercatat sebesar Rp 3.652.508 yang seluruhnya merupakan utang lancar. Komponen utang lancar terdiri dari utang usaha sebesar Rp 3.500.000 yang kemungkinan merupakan kewajiban kepada pemasok bahan baku, serta PPh Final UMKM sebesar Rp 152.508 yang dihitung 0,5% dari omzet Rp 30.501.500. Pencatatan kewajiban perpajakan ini menunjukkan kesadaran pemilik Bakso Bahari dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku untuk UMKM. Tidak adanya utang jangka panjang mengindikasikan bahwa Bakso Bahari tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi lebih dari satu tahun, sehingga beban finansial jangka panjang relatif rendah.

Ekuitas Bakso Bahari tercatat sebesar Rp 20.467.742 yang terdiri dari modal pemilik per 1 Maret 2025 sebesar Rp 16.702.892 dan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 3.764.850. Proporsi ekuitas yang mencapai 84,9% dari total pasiva dan ekuitas menunjukkan struktur permodalan yang kuat dengan ketergantungan relatif rendah terhadap utang. Penambahan laba bersih periode berjalan ke dalam ekuitas mengindikasikan bahwa keuntungan usaha diinvestasikan kembali untuk memperkuat modal usaha.

Neraca Bakso Bahari telah memenuhi prinsip dasar akuntansi dengan keseimbangan antara total aktiva (Rp 24.120.250) dan total pasiva ditambah ekuitas (Rp 24.120.250). Namun, berdasarkan hasil wawancara yang disebutkan dalam penelitian, implementasi SAK-EMKM pada Bakso Bahari masih belum optimal karena keterbatasan pengetahuan pemilik mengenai standar akuntansi tersebut. Pencatatan keuangan yang dilakukan masih sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan SAK-EMKM yang mensyaratkan penyajian laporan posisi keuangan yang lebih komprehensif dengan klasifikasi yang lebih terperinci.

Rasio keuangan yang dapat dihitung dari neraca ini menunjukkan posisi keuangan Bakso Bahari yang relatif sehat. Rasio likuiditas (current ratio) sebesar 2,5 kali (Rp 9.120.250 / Rp

3.652.508) menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas (debt to asset ratio) sebesar 0,15 atau 15% (Rp 3.652.508 / Rp 24.120.250) menunjukkan tingkat utang yang rendah dibandingkan dengan total aset. Rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) sebesar 0,18 atau 18% (Rp 3.652.508 / Rp 20.467.742) juga mengindikasikan struktur modal yang konservatif dengan ketergantungan minim terhadap pendanaan eksternal.

Meskipun telah melakukan pencatatan neraca, implementasi SAK-EMKM pada Bakso Bahari masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengakuan penyusutan aktiva tetap, pengklasifikasian aset dan kewajiban yang lebih terperinci, serta penyajian catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan sesuai SAK-EMKM. Peningkatan pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang lebih baik akan memungkinkan Bakso Bahari untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan berguna bagi pengambilan keputusan bisnis, akses terhadap pembiayaan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Omset/Penjualan Bruto Bulan Maret 2025 : Rp. 30.501.500

Skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Final 0,5%)

$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Omzet}$

$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Rp. } 30.501.500 = \text{Rp. } 152.508$

Jadi, PPh final yang harus di bayarkan oleh pemilik pada Omzet bulan Maret 2025 ini adalah Rp. 152.508

- Skema Pelaporan Pajak PPh Final UMKM

Berdasarkan perhitungan omzet bulanan dari Usaha Bakso Bahari, usaha tersebut terkena PPh Final sebesar Rp. 152.508. Kemudian Lanjut membuat SSP atau e-Billing di DJP Online dengan mengisi lampiran e-Billing di bagian jenis pajak 411128(PPh Final), jenis setoran 420 (Final UMKM) Masa pajak : 03-2025, kemudian bayar melalui bank/kantor pos. Laporan PPh Final UMKM dilakukan setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian di akhir tahun perlu melaporkan SPT Tahunan 1770 bagi orang pribadi melalui laman DJP Online. Namun jika omzet pertahun usaha Bakso Bahari pertahun hanya mendekati Rp. 500juta, Pemilik Bakso Bahari Bebas Pajak sampai batas berlaku, dan hanya berlaku khusus bagi wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Artikel ini menekankan pentingnya akuntansi keuangan bagi UMKM, khususnya pada usaha Bakso Bahari. Dengan pencatatan yang rapi sesuai SAK-EMKM, pelaku usaha dapat mengelola transaksi, memantau keuntungan, menghemat biaya, dan memenuhi kewajiban pajak. Disarankan agar pemilik usaha meningkatkan pemahaman akuntansi melalui pelatihan, melakukan evaluasi biaya bahan baku dan operasional, serta menyusun laporan keuangan yang memisahkan biaya tetap dan variabel. Strategi pemasaran seperti promosi online juga dianjurkan. Selain itu, sebagian laba disarankan untuk diinvestasikan demi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Almujab, S., & Budiutomo, S. (2017). Pengaruh akuntansi berbasis ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 29–40.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Cahyani, L. P. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Cerniati, C. (2020). Pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. *ENTRIES*, 2(2), 204–222.
- Dewi, S. Y. (2020). Pengaruh pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, jenjang pendidikan dan lama usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kuliner di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 46–54.
- Dwi, M. (2012). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hans, K., dkk. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2002). *Analisa kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husein, U. (2014). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1998). PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998).
- Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 79–98.
- Puspitaningrum, D. K., Kurniawati, S. L., & Metana, N. Y. (2017). Pelaporan keuangan pada UMKM di Surabaya (Studi pada UKM Diah Cookies). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), [halaman tidak dicantumkan].

- Resmi, S. (2007). *Perpajakan: Teori dan kasus (Buku II, Edisi ke-3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi ke-4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar akuntansi: Konsep & teknik penyusunan laporan keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sadeli, L. M. (2011). *Dasar-dasar akuntansi (Edisi I, Cetakan ke-7)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), 1 Januari 2018
- Sembiring, Y., & Elisabeth, D. M. (2018). Penerapan sistem akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 89–101.
- Singarimbun, E. M. (2018). Pemerintah turunkan tarif PPh final UMKM jadi 0,5%. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7//Siaran%20Pers%20PP23.pdf> (accessed April 27, 2025, at 15:30).
- Sodikin, S., & Riyono, B. (2014). *Akuntansi pengantar 1 (Edisi ke-9)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2016). *Pengantar akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Swardjono. (2010). *Teori akuntansi: Pengungkapan dan sarana interpretatif (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Retrieved from <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ciri-dan-jenis-perusahaan-dagangbeserta-contohnya-terlengkap/> (accessed April 25, 2025, at 14:30).
- Valentina, S. S., & Suryo, A. (2003). *Perpajakan Indonesia: Seri belajar untuk mahasiswa*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru (Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.